



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
( LKj IP)  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KOORDINASI WILAYAH I  
TAHUN 2015**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Koordinasi Wilayah I (Bakorwil I) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. LkjIP Bakorwil I Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Bakorwil I telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I ini.

Tujuan penyusunan LkjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun

yang akan datang. Melalui penyusunan LkjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan pemerintah.

Demikian LkjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pati, 15 Februari 2016  
Plt. **KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH I  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
Sekretaris

TTD.

**KARTIKO SUKARNO, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19601109 199103 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Daftar Lampiran .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Fungsi Strategis Bakorwil I .....	4
C. Isu Strategis .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
A. Perencanaan Strategis .....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 .....</b>	<b>13</b>
A. Capaian Kinerja .....	13
B. Realisasi Anggaran.....	21
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum.....	25
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	26
Lampiran-Lampiran.....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bakorwil I tahun 2015..	3
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Bakorwil I Tahun 2015.....	3
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bakorwil I tahun 2015.....	12
Tabel 3.1 Skala Pengukuran LKjIP.....	14
Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 Tahun 2015.....	15
Tabel 3.3 Capaian Sasaran 2 Tahun 2015.....	17
Tabel 3.4 Capaian Sasaran 3 Tahun 2015.....	18
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 .....	21
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2015 .....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bakorwil I .....	2
---	---

## DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Bakorwil I Tahun 2015.....	29
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bakorwil I memiliki tugas pokok membantu gubernur dibidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah, mengampu 9 Kabupaten dan 2 Kota di Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.

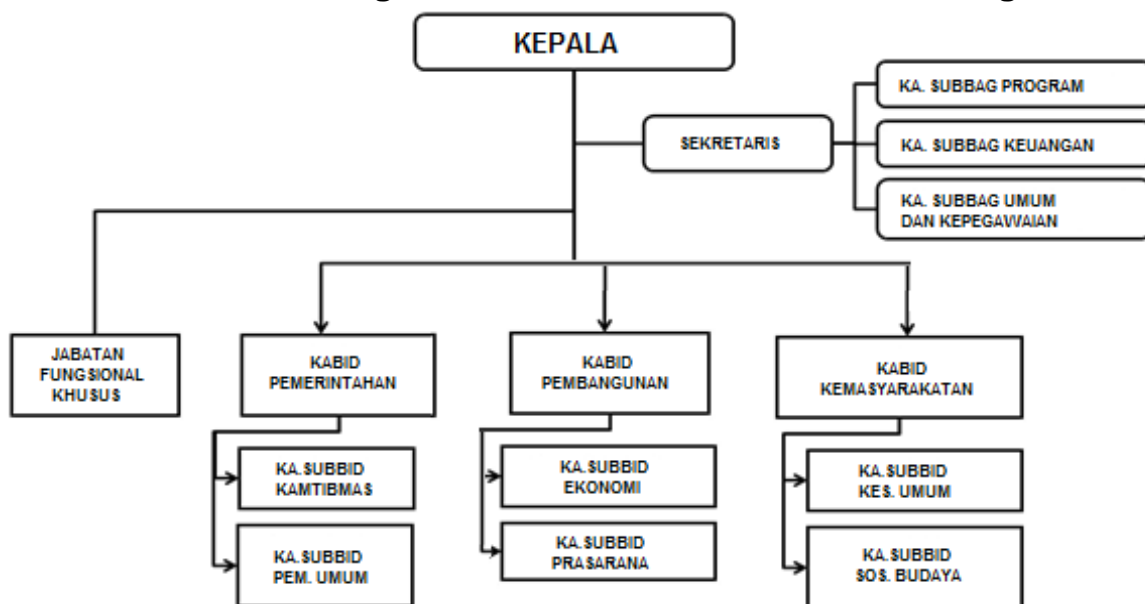
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
2. penyusunan rencana dan program dibidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
3. koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;

5. pelaksanaan kesekretariatan badan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bakorwil I terdiri dari sekretariat dan 3 bidang, yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun bagan struktur organisasi Bakorwil I sebagai berikut

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2008

Bakorwil I pada tahun 2015 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 56 orang terdiri dari 43 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 orang Pegawai Honorer (tenaga tidak tetap) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2015**

No	BIDANG	PENDIDIKAN							Total
		SD	SLTP	SLTA	D-III	D-IV	S-1	S-2	
1	Sekretariat	1	2	14	-	-	2	4	23
2	Pemerintahan	1	1	1	-	-	1	3	7
3	Pembangunan	-	-	3	-	1	-	2	6
4	Kemasyarakatan	-	-	3	-	1	2	1	7
5	Honorer	-	-	11	1	-	1	-	13
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>56</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2015

Dalam mendukung kinerja Bakorwil I, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Jenis prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional, meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Bakorwil I sejauh ini dirasa cukup memadai dalam menunjang kinerja instansi. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Bakorwil I tahun 2015 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2015**

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
1	Komputer	29	Unit
2	Monitor	20	Unit
3	Printer	28	Unit
4	Notebook / Laptop	9	Unit
5	LCD Proyektor	5	Unit
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik	8	Unit
7	AC Split	17	Unit
8	AC Casette	7	Unit
9	Televisi	11	Unit
10	Telepon External	1	Unit
11	Sound System	1	Unit
12	Filling Cabinet	11	Unit
13	LAN ( <i>Local Net Working</i> )	2	Jaringan
14	Kendaraan Roda 4	16	Unit
15	Kendaraan Roda 2	13	Unit
16	Ruang Rapat	3	Unit

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2015

## **B. Fungsi Strategis**

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya serta mendasarkan pada prioritas dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I tahun 2013-2018, Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi strategis **mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah.**

Dalam upaya melaksanakan fungsi strategis tersebut, Bakorwil I melaksanakan peran sebagai berikut :

1. mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima melalui peningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mengupayakan hubungan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga lain;
2. mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui upaya peningkatan kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui fasilitasi bantuan air bersih bagi masyarakat korban bencana alam kekeringan, kebakaran, banjir dan bencana lainnya.

### **C. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepoankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Isu strategis berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa mendatang. Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam upaya pencapaian fungsi strategis Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah yang memerlukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota;
2. belum optimalnya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak pada kabupaten/kota di Bakorwil I;
3. meningkatnya frekuensi kejadian bencana dengan skala dan intensitasnya, meliputi bencana banjir, kekeringan dan bencana lainnya;
4. belum optimalnya kinerja pelayanan Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah yang menyangkut aspek administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai SKPD selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Dalam upaya melaksanakan perencanaan strategis, setiap SKPD menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahunan.

Menindak lanjuti amanah RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, telah disusun Renstra Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahunan.

#### **1. Visi Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi jangka menengah Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut

**“TERWUJUDNYA KETERPADUAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DI WILAYAH BAKORWIL I PROVINSI JAWA TENGAH SECARA BERKEADILAN”**

Visi ini mengandung arti : terwujudnya keterpaduan pembangunan antar daerah di wilayah Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tercapainya sinergitas, keselarasan kebijakan antara Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah. Mendorong kemandirian Jawa Tengah sebagai upaya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan mengeksploitasi seluruh potensi yang ada, kesetaraan dan keadilan gender, Kabupaten/Kota layak anak yang berkualitas dan penanggulangan bencana secara baik di Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Misi Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Misi Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi jangka menengah Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah.

Guna mewujudkan Visi Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka disusunlah 3 misi sebagai berikut :

- mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur;
- mewujudkan sinkronisasi program-program pembangunan antar kabupaten/kota, antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga lain;
- mendorong kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak dan penanggulangan bencana.

## **3. Tujuan Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Misi SKPD. Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah melaksanakan misi melalui upaya memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang

dihadapi. Adapun tujuan Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah

- mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang profesional didukung sarana prasarana yang memadai;
- meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota, antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga lain;
- meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### **4. Sasaran Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun sasaran Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah

- meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang profesional pada Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah;
- meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah;
- terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana alam di wilayah kerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah.

#### **5. Strategi Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Mendasarkan pada

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan strategi Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 sebagai berikut :

- mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di wilayah kerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai forum koordinasi, fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- meningkatkan komitmen kabupaten/kota dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di wilayah kerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai rakor peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- meningkatkan jalinan kerjasama dengan SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana di wilayah kerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah.

## **6. Arah Kebijakan Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang ditetapkan, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut

- peningkatan kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Bakorwil I;
- peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender dan penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak;
- peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kerja Bakorwil I;

- peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana prasarana, peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari kepala daerah kepada pimpinan SKPD untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur dan tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah

1. sebagai wujud nyata komitmen antara kepala daerah dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi kepala daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 telah melakukan perjanjian kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 7 program dan 31 Kegiatan, dimana terdapat 3 program dan 9 kegiatan strategis yang diperjanjikan serta 4 program dan 22 kegiatan merupakan kegiatan rutin SKPD (eks BAU). Dalam melaksanakan perjanjian kinerja tahun 2015, Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah mendapat dukungan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 13.063.395.000,- (tiga belas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara kepala Bakorwil I dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2015, secara lengkap tercantum pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Indeks Williamson	0,7007	Rp 1.873.000.000
	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan mediasi bidang pemerintahan	28 kali	
	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan mediasi bidang pembangunan	16 kali	
	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan mediasi bidang kemasyarakatan	16 kali	
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Telah Melaksanakan Kebijakan Pembangunan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	11 Kabupaten/Kota	Rp 180.000.000
Meningkatnya Sinergitas Penanganan Bencana di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan 1.512 Tangki Air Bersih</li> <li>• Bantuan Pemadam Kebakaran untuk 20 Kejadian (40 Tangki)</li> <li>• Pelaksanaan 2 Rakor</li> </ul>	Rp.631.042.000

Sumber : Penetapan Kinerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran dengan menitikberatkan pada aspek pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas keuangan, evaluasi dan analisis kinerja. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75-100%	Baik
3.	55-74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

Pada tahun 2015, Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Bakorwil I tahun 2015 dan Renstra Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, setidaknya terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

- 1. Sasaran 1 : meningkatnya koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum kabupaten/kota di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Sasaran 1 Tahun 2015**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1.	Indeks Williamson	0,7007	0,6579 <sup>1</sup>	106,51	0,6579	106,19
2.	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan mediasi bidang pemerintahan	28 Rakor	28 Rakor	100	17 Rakor	19,05
3.	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan mediasi bidang pembangunan	16 Rakor	15 Rakor	93,75	12 Rakor	17,44
4.	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan mediasi bidang kemasyarakatan	16 Rakor	16 Rakor	100	13 Rakor	17,20
<b>Rata-Rata</b>				<b>100,07</b>	<b>--</b>	<b>39,97</b>

Sumber : LKPJ Bakorwil I TA. 2015

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran 1 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 4 (empat) indikator dalam sasaran ini 2 (dua) diantaranya memiliki kinerja 100%, 1 (satu) indikator diatas 100% dan 1 (satu) indikator dibawah 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, kinerja tahun 2015 **lebih tinggi**. Hal ini terlihat dari 4 indikator pada tahun 2015, seluruhnya memiliki realisasi lebih tinggi dari tahun 2014. Realisasi kinerja pada tahun 2015 dengan indeks williamson sebesar 0,6579<sup>1</sup> dan 59 kali kegiatan koordinasi dan mediasi **lebih tinggi** dari realisasi tahun 2014 dengan 19 jenis laporan dan 43 kali kegiatan koordinasi dan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bakorwil I pada tahun 2015 telah berhasil meningkatkan kinerja sasaran 1 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk realisasi kinerja sampai tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana telah

<sup>1</sup> Data tahun 2013. Untuk capaian tahun 2014 dan 2015 belum tersedia

ditetapkan dalam Renstra Bakorwil I telah tercapai 39,97%, ini berarti lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 20%. Penyebab tingginya capaian kinerja tahun 2015, apabila ditelaah lebih lanjut disebabkan karena berkurangnya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil I dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat menyebabkan capaian indeks williamson melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran 1 adalah sebesar Rp 1.801.070.000 atau 97,45% dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.848.175.000<sup>2</sup>. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,55%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 penyerapan anggaran tahun 2015 lebih kecil.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2015, tidak terlepas dari dilaksanakannya program penyelenggaraan pemerintahan umum dengan 5 kegiatan, yaitu

- a. kegiatan peningkatan bidang kesekretariatan, dengan capaian 11 jenis laporan;
- b. kegiatan koordinasi dan mediasi penyelenggaraan bidang pemerintahan kabupaten/kota se Bakorwil I, dengan capaian 16 kegiatan;
- c. kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar daerah se wilayah Bakorwil I, dengan capaian 12 kegiatan;
- d. kegiatan koordinasi dan mediasi penyelenggaraan bidang pembangunan kabupaten/kota se Bakorwil I, dengan capaian 15 kegiatan;

---

<sup>2</sup> APBD Perubahan TA 2015

e. kegiatan koordinasi dan mediasi penyelenggaraan bidang kemasyarakatan kabupaten/kota se Bakorwil I, dengan capaian 16 kegiatan.

**2. Sasaran 2 : meningkatnya sinergitas kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran 2 Tahun 2015**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	100
<b>Rata-Rata</b>			<b>100</b>	<b>--</b>	<b>100</b>

Sumber : LKPJ Bakorwil I TA. 2015

Secara umum capaian indikator pada sasaran 2 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 1 (satu) indikator dalam sasaran ini memiliki kinerja 100%. Apabila dibandingkan, kinerja tahun 2015 **sama dengan** kinerja tahun 2014.

Analisis lebih lanjut mengenai tercapainya indikator pada sasaran 2 disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu adanya dukungan SKPD teknis provinsi dan kabupaten/kota, dukungan anggaran yang cukup dan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Perlu diketahui pada tahun 2015 seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil I telah mengimplementasikan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender).

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran 1 adalah sebesar Rp 172.988.000 atau 97,93% dari total pagu anggaran sebesar Rp 176.650.000<sup>3</sup>. Hal ini berarti terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,07%. Jika dibandingkan penggunaan anggaran tahun 2015 lebih kecil daripada tahun 2014 hanya terserap 99,81%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 pada tahun 2015, tidak terlepas dari dilaksanakannya program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dengan 3 kegiatan, yaitu

- a. kegiatan pengembangan sistem perlindungan untuk pencegahan kekerasan dan perempuan kelompok rentan, dengan capaian 2 kegiatan;
- b. kegiatan advokasi pengembangan kota layak anak, dengan capaian 2 kegiatan;
- c. kegiatan rakor pengarusutamaan gender, dengan capaian 1 kegiatan dan 1 dokumen PPRG;

### 3. Sasaran 3 : meningkatnya sinergitas penanganan bencana di kabupaten/kota

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran 3 Tahun 2015**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1.	Bantuan air bersih untuk mengatasi bencana alam banjir, tanah longsor dan kebakaran. • Bantuan air bersih	1.512 tangki	1.512 tangki	100	1.620	10,25

<sup>3</sup> APBD Perubahan TA 2015

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
	• Bantuan pemadam kebakaran	20 kej (40 tangki)	20 kej (40 tangki)	100	20 kej (35 tangki)	14,29
2.	Bantuan bahan pangan bagi korban bencana alam • Bantuan beras	-	-	-	6.000 Kg	0
3.	Jumlah rakor antisipasi bencana alam	2 kali	2 kali	100	3 kali	9,09
<b>Rata-Rata</b>				<b>100</b>	<b>--</b>	<b>11,21</b>

Sumber : LKPJ Bakorwil I TA. 2015

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran 3 dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk capaian bantuan pemadam kebakaran sebesar 40 tangki sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk capaian kinerja lainnya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, kinerja tahun 2015 **lebih rendah**. Hal ini terlihat dari 3 indikator pada tahun 2015, 3 indikator memiliki realisasi lebih rendah dari tahun 2014. Realisasi kinerja bantuan air bersih mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu rendahnya dukungan anggaran yang berakibat pada penurunan target kinerja.

Untuk realisasi kinerja sampai tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah telah tercapai 11,21%, ini berarti lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 20%. Penyebab rendahnya capaian kinerja tahun 2015, apabila ditelaah lebih lanjut disebabkan tidak tercapainya seluruh indikator dalam sasaran 3 ini dikarenakan

terbatasnya dukungan anggaran dan tergantung pada frekuensi kejadian bencana yang ada.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja pada sasaran 3 adalah

- a. mengupayakan usulan anggaran yang memadai kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan melalui penyusunan KUA-PPAS maupun koordinasi dengan pihak terkait;
- b. melakukan koordinasi rutin dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penanganan korban bencana.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran 3 adalah sebesar Rp 554.860.100 atau 88,89% dari total pagu anggaran sebesar Rp 624.242.000<sup>4</sup>. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,11%. Jika dibandingkan dengan tahun penggunaan sumber daya keuangan tahun 2015 lebih rendah daripada tahun 2014 yang terserap 97,32%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 pada tahun 2015, tidak terlepas dari dilaksanakannya program penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan kegiatan pengadaan air bersih pasca kekeringan, kebakaran dan tanah longsor di Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah dengan capaian kinerja bantuan air bersih sebanyak 1.512 tangki (Kabupaten Semarang, Grobogan, Blora, Rembang dan Pati), bantuan pemadam kebakaran sebanyak 40 tangki untuk 20 kejadian kebakaran di Kabupaten Pati dan Kota Semarang, serta pelaksanaan 2 rapat koordinasi penanggulangan bencana.

---

<sup>4</sup> APBD Perubahan TA 2015

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2015, didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.063.395.000<sup>5</sup> yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 5.991.039.000 dan belanja langsung sebesar Rp 7.072.356.000. Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, serta tambahan penghasilan pegawai Bakorwil I, sedangkan belanja langsung digunakan untuk melaksanakan 7 program dan 31 kegiatan yang terdiri dari program prioritas dan program rutin SKPD (eks BAU).

Realisasi belanja tidak langsung hingga akhir tahun anggaran 2015 telah terserap sebesar Rp 5.550.952.716,- atau sebesar 92,65%. Capaian belanja tidak langsung tahun anggaran 2015, dijelaskan dalam tabel 3.5 sebagai berikut

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2015**

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Gaji dan Tunjangan	Rp 2.746.064.000	Rp 2.325.773.222	84,69
Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp 3.244.975.000	Rp 3.225.179.494	99,39
<b>Total</b>	<b>Rp 5.991.039.000</b>	<b>Rp 5.550.952.716</b>	<b>92,65</b>

Sumber : LKPJ Bakorwil I TA. 2015

Belanja langsung digunakan untuk melaksanakan 7 program dan 31 kegiatan. Secara ringkas komposisi penggunaan belanja langsung sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai, sebesar Rp 628.120.000,-
- b. Belanja belanja barang dan jasa, sebesar Rp 5.862.606.000,-
- c. Belanja modal, sebesar Rp 581.630.000,-

<sup>5</sup> APBD Perubahan TA 2015

Penggunaan belanja langsung tersebut, apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Belanja Langsung Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah**  
**APBD Perubahan Tahun 2015**

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
<b>Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>			
	Peningkatan bidang kesekretariatan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	100
	Koordinasi dan mediasi penyelenggaraan bidang pemerintahan kabupaten/kota se Bakorwil I	Rp 467.900.000	Rp 467.450.000	99,90
	Penyelenggaraan kerjasama antar daerah se wilayah Bakorwil I	Rp 346.350.000	Rp 345.300.000	99,70
	Koordinasi dan mediasi penyelenggaraan bidang pembangunan kabupaten/kota se Bakorwil I	Rp 463.425.000	Rp 448.500.000	96,78
	Koordinasi dan mediasi penyelenggaraan bidang kemasyarakatan kabupaten/kota se Bakorwil I	Rp 470.500.000	Rp 439.820.000	93,48
<b>Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>			
	Pengembangan sistem perlindungan untuk pencegahan kekerasan dan perempuan kelompok rentan	Rp 58.750.000	Rp 57.240.000	97,43
	Advokasi dan pengembangan kota layak anak	Rp 58.750.000	Rp 57.340.000	97,60
	Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG)	Rp 59.150.000	Rp 58.408.000	98,75
<b>Meningkatnya Sinergitas Penanganan Bencana di Kabupaten/Kota</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>			
	Pengadaan air bersih pasca kekeringan, kebakaran dan tanah longsor di Bakorwil I	Rp 624.242.000	Rp 554.860.100	88,89
<b>Program Rutin Bakorwil I (eks BAU)</b>	<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>			
	Penyediaan administrasi perkantoran	Rp 8.910.000	Rp 8.910.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 276.000.000	Rp 216.813.421	78,56
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Rp 15.000.000	Rp 13.180.000	87,87

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	Jaminan barang milik daerah	Rp 110.000.000	Rp 76.581.000	69,62
	Penyediaan Alat tulis kantor	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp 65.900.000	Rp 65.900.000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 70.950.000	Rp 70.950.000	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 25.935.000	Rp 25.855.000	99,69
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 165.000.000	Rp 165.000.000	100
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	Rp 850.200.000	Rp 850.005.840	99,98
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Rp 410.798.000	Rp 399.624.395	97,28
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp 234.930.000	Rp 223.504.000	95,14
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rp 544.200.000	Rp 534.340.760	98,19
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 660.800.000	Rp 653.925.770	98,96
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 472.353.000	Rp 431.677.857	91,39
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 8.000.000	RP 8.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	100
	Pemeliharaan buku-buku perpustakaan	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100
	Peningkatan sarana dan prasarana kantor	Rp 291.700.000	Rp 278.300.000	95,41
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 30.113.000	Rp 29.318.000	97,36
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 66.900.000	Rp 16.225.000	24,30
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 7.072.356.000</b>	<b>Rp 6.712.629.143</b>	<b>94,91</b>

Sumber : Laporan Keuangan Bakorwil I TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2015 realisasi penyerapan belanja langsung sebesar 94,91%. Terdapat 7 kegiatan yang penyerapannya dibawah rata-rata penyerapan Bakorwil I. Dari 7 kegiatan tersebut, semuanya termasuk kedalam kegiatan rutin SKPD (eks BAU). Sedangkan pada kegiatan yang termasuk dalam perjanjian kinerja, seluruhnya diatas rata-rata capaian Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah.

Apabila dibandingkan penyerapan anggaran tahun 2015, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 94,91% lebih rendah dari penyerapan anggaran tahun 2014 hanya terserap 97,11%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Tinjauan Umum**

Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok membantu gubernur dibidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah. Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi fungsi strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **sangat baik**. Hal tersebut didukung data sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran pencapaian sasaran dicapai rata-rata pencapaian sebesar 100,02%, dengan rincian :
  - a. sasaran 1 (meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) dengan capaian kinerja 100,07%;
  - b. sasaran 2 (meningkatnya koordinasi pengarusutamaan gender dan perwujudan kabupaten/kota layak anak diwilayah Bakorwil I) dengan capaian kinerja 100%;
  - c. sasaran 3 (terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana alam di wilayah Bakorwil I) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Hasil pengukuran realisasi anggaran dicapai rata-rata pencapaian sebesar 94,72%, dengan rincian :
  - a. Realisasi belanja langsung, dengan capaian sebesar 94,91%;
  - b. Realisasi belanja tidak langsung, dengan capaian sebesar 92,65%.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Strategi guna meningkatkan kinerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan forum-forum koordinasi pemerintahan umum dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai sinergitas pembangunan antar kabupaten/kota di Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah;
2. meningkatkan komitmen Kabupaten/Kota dalam upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di wilayah kerja Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai rakor peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
3. meningkatkan jalinan kerjasama dengan SKPD provinsi dan kabupaten/kota serta dengan lembaga lainnya dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana di wilan Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah;
4. meningkatkan kinerja pelayanan Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah melalui optimalisasi sarana prasarana dan meningkatkan kapasitas SDM Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2015 dari Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH I  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
Sekretaris

**KARTIKO SUKARNO, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19601109 199103 1 002

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1**  
**PERJANJIAN KINERJA BAKORWIL I TAHUN 2015**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH I**

Jl. P. Sudirman No. 52 Pati 59113 Telp (0295) 381806 Fax. 383156  
website : bakorwil1.jatengprov.go.id e-mail : bakorwil1@jatengprov.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suko Mardiono, SH, MM  
Jabatan : Kepala Badan Koordinasi Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.Ganjar Pranowo, SH, M.IP  
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2 Pebruari 2015

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**

TTD.

**H.GANJAR PRANOWO, SH,M.IP**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH I**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

TTD.

**SUKO MARDIONO, SH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP 19620310 198811 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1. Indeks Williamson 2. Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi Bidang Pemerintahan 3. Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi Bidang Pembangunan 4. Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi Bidang Kemasyarakatan	0,7000 28 Rakor 19 Rakor 18 Rakor
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Telah Melaksanakan Kebijakan Pembangunan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	11 Kabupaten/Kota
Meningkatnya Sinergitas Penanganan Bencana di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penanganan Bencana	1. Bantuan 2.592 Tangki Air Bersih 2. Bantuan Pemadam Kebakaran untuk 30 Kejadian (60 Tangki) 3. Pelaksanaan 4 Rakor Penanggulangan Bencana

	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp 2.161.100.000,-	APBD
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 180.000.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp 900.000.000,-	APBD
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.138.110.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.946.190.000,-	APBD
6.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 32.000.000,-	APBD
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 45.000.000,-	APBD

Semarang,

2016

Pihak Kedua  
GUBERNUR JAWA TENGAH

Pihak Pertama  
Plt. KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH I  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris

TTD.

TTD.

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

KARTIKO SUKARNO, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP 19601109 199103 1 002